

Analisis Jangkauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terhadap Permukiman di Kabupaten Sumedang

Suci Aulia, Indrianawati

Institut Teknologi Nasional Bandung
Email: sucihermawanto123@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan kondisi topografi yang bervariasi di Kabupaten Sumedang mempengaruhi jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau. Topografi Kabupaten Sumedang yang bervariasi, dari dataran hingga perbukitan, menambah kompleksitas distribusi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan terhadap permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumedang menggunakan metode network analyst service area. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan mampu menjangkau 73% wilayah permukiman di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil analisis overlay antara sebaran fasilitas kesehatan, jangkauan fasilitas kesehatan terhadap permukiman, kondisi topografi, dan jaringan jalan diperoleh informasi bahwa jumlah fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan belum merata dan memadai. Akibatnya, terdapat permukiman di Kabupaten Sumedang yang belum terjangkau karena berada di luar radius jangkauan fasilitas kesehatan.

Kata kunci: fasilitas kesehatan, jangkauan pelayanan, network analyst service area

1. PENDAHULUAN

Sumedang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas keseluruhan yaitu 55.871,98 Ha dan terbagi ke dalam 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 mencapai angka 1,26% (BPS Kabupaten Sumedang, 2023). Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berjalan seiringan dengan permintaan masyarakat pada suatu fasilitas pelayanan di bidang kesehatan (Natsir, dkk., 2021). Hal ini juga dinyatakan oleh Rahmah dkk. (2023), meningkatnya jumlah penduduk memerlukan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah. Penyediaan dan pembangunan sarana prasarana, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan ini harus diprioritaskan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas kesehatan (faskes) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan data dari BPS (2023) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023), fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumedang terdiri dari 3 rumah sakit, 35 puskesmas, 65 puskesmas pembantu, dan 86 klinik. Dari ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Sumedang, Natsir dkk., (2019) menjelaskan bahwa persebaran rumah sakit yang telah ada masih belum merata, dimana jangkauan layanan rumah sakit tidak menyebar secara efisien karena hanya 13 kecamatan yang terlayani dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Selain pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi (Dhewi & Kuspriyanto, 2019), jangkauan

pelayanan fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh topografi wilayah. Berdasarkan topografi, Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut dan hampir sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang merupakan dataran tinggi, kecuali pada sebagian kecil wilayah utara yang berupa dataran rendah (Wiguno, 2014). Dengan kondisi topografi wilayah yang seperti ini, tentu mempengaruhi jangkauan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Untuk dapat mengetahui merata atau tidaknya layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap permukiman di Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian Budiman & Cahyono (2017), Arif & Zain (2019), Dhewi & Kuspriyanto (2019), serta Niwa & Saputra (2024), analisis jangkauan layanan fasilitas kesehatan dilakukan dengan menggunakan metode *buffer*. Sementara dalam penelitian ini, jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan akan dianalisis dengan menggunakan metode *network analysis service area*. Adapun radius jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan SNI (Standardisasi Nasional Indonesia) 03-1733-2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, dimana untuk rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik berturut-turut sepanjang 5.000 m, 3.000 m, 1.500 m, dan 4.000 m. Diharapkan dari hasil penelitian mengenai analisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap permukiman di Kabupaten Sumedang ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sebaran lokasi fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumedang ke depannya.

2. DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Data Penelitian

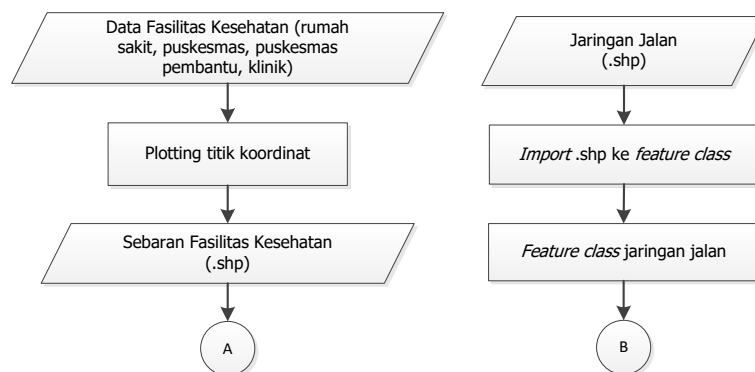
Data yang digunakan dalam penelitian ini dirincikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penelitian

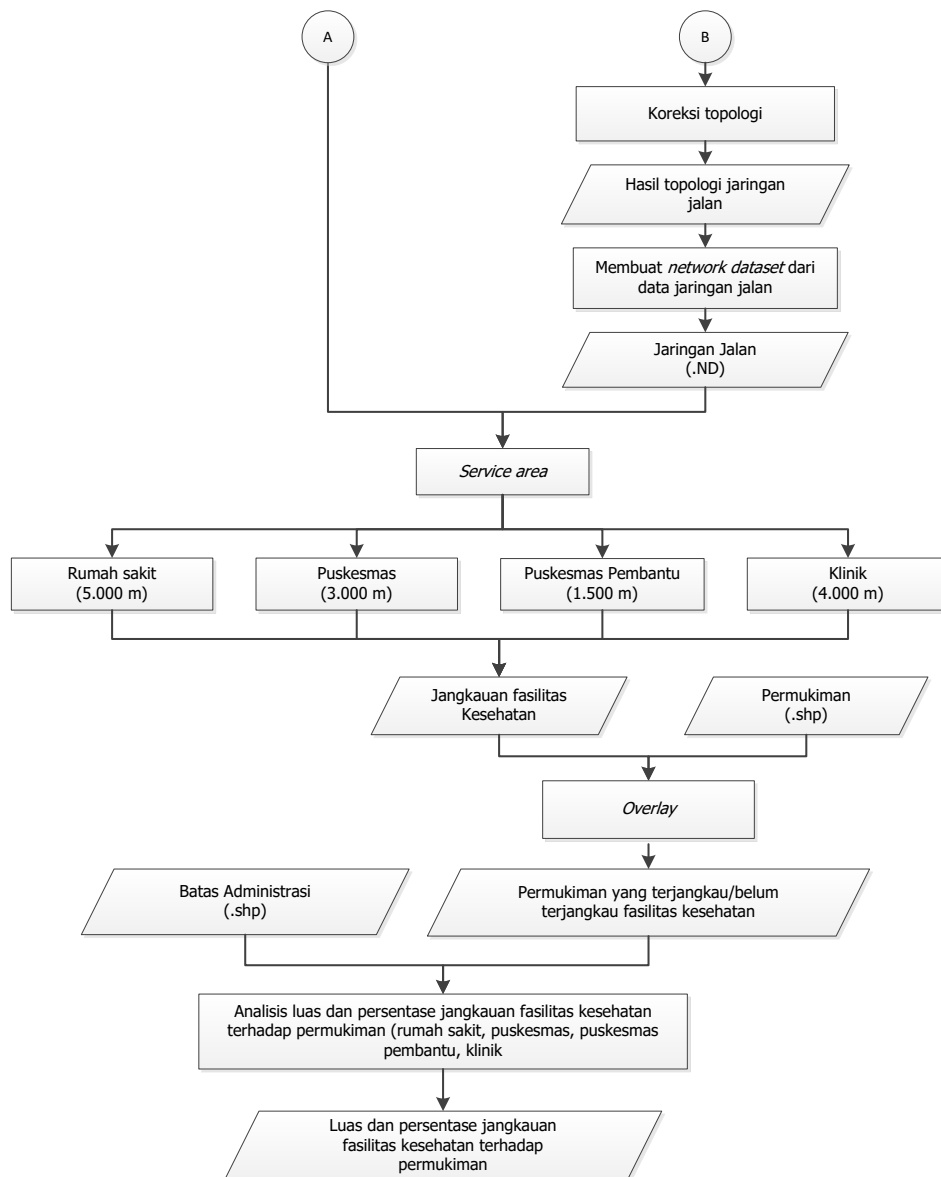
No.	Jenis Data	Skala	Tahun	Format Data	Sumber Perolehan Data
1.	Fasilitas Kesehatan	-	2023	tabular	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
2.	Batas Administrasi	1:25.000	2022	.shp	Badan Informasi Geospasial
3.	Permukiman	1:25.000	2022	.shp	Badan Informasi Geospasial
4.	Jaringan Jalan	1:25.000	2022	.shp	Badan Informasi Geospasial
5.	Ketinggian (kontur)	1:25.000	2022	.shp	Badan Informasi Geospasial

2.2 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.



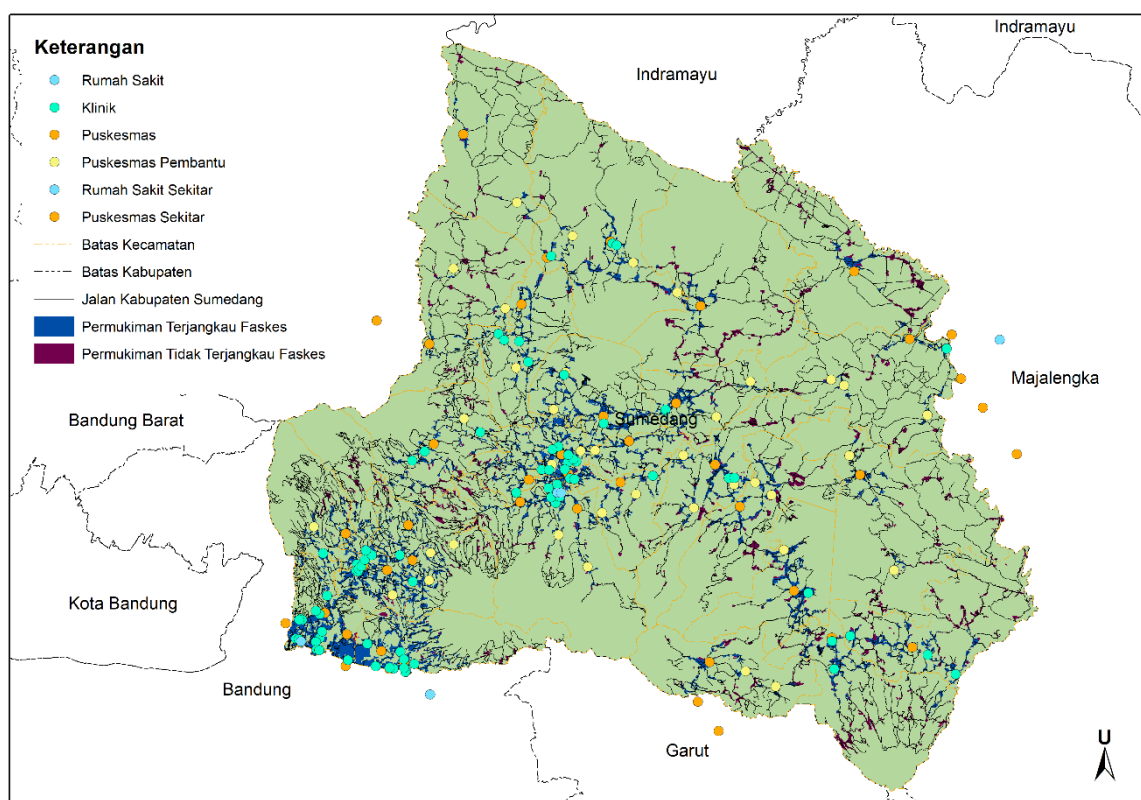
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian (lanjutan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Radius jangkauan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini merujuk pada SNI 03-1733-2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Hasil yang didapat dari analisis menggunakan metode *network analyst service area* berupa area jangkauan dari masing-masing jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang, Untuk mengetahui jangkauan layanan fasilitas kesehatan, maka dilakukan *overlay* antara hasil analisis *service area* dengan permukiman yang ada di Kabupaten Sumedang, dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya dapat menjangkau permukiman di Kabupaten Sumedang seluas 8.980 Ha (73%) dari total luas wilayah 12.313 Ha, artinya masih terdapat 3.333 Ha (27%) wilayah permukiman di Kabupaten Sumedang yang belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, klinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu.



Gambar 2. Visualisasi Jangkauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terhadap Permukiman di Kabupaten Sumedang

Luas dan persentase permukiman Kabupaten Sumedang yang terjangkau dan belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2. Luas dan Presentase Permukiman di Kabupaten Sumedang yang Terjangkau dan Belum Terjangkau oleh Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)		Persentase (%)	
		Terjangkau	Belum Terjangkau	Terjangkau	Belum Terjangkau
1	Buahdua	348	79	81	19
2	Cibugel	184	149	55	45
3	Cimalaka	561	13	98	2
4	Cimanggung	706	92	88	12
5	Cisarua	187	28	87	13
6	Cisitu	244	248	50	50
7	Conggeang	160	258	38	62
8	Darmaraja	395	69	85	15
9	Ganeas	144	36	80	20
10	Jatigede	130	215	38	62
11	Jatinangor	853	12	99	1
12	Jatinunggal	352	276	56	44
13	Pamulihan	458	187	71	29
14	Paseh	308	82	79	21

No	Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)		Persentase (%)	
		Terjangkau	Belum Terjangkau	Terjangkau	Belum Terjangkau
15	Rancakalong	286	129	69	31
16	Situraja	359	149	71	29
17	Sukasari	243	42	85	15
18	Sumedang Selatan	491	145	77	23
19	Sumedang Utara	793	55	94	6
20	Surian	75	70	52	48
21	Tanjungkerta	312	36	90	10
22	Tanjungmedar	123	171	42	58
23	Tanjungsari	681	87	89	11
24	Tomo	169	108	61	39
25	Ujungjaya	132	330	29	71
26	Wado	286	267	52	48
Total		8.980	3.333		

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh informasi bahwa dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, terdapat 5 (lima) kecamatan dengan luas wilayah permukiman belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan lebih dari 50% dari luas keseluruhan permukiman di kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Cisu, Conggeang, Jatigede, Tanjungsari, dan Ujungjaya. Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara sebaran fasilitas kesehatan, jangkauan fasilitas kesehatan terhadap permukiman, kondisi topografi, dan jaringan jalan, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Kecamatan Cisu : 50% permukiman di Kecamatan Cisu belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan karena jumlah dan keberadaan fasilitas kesehatan yang belum merata, serta terdapat beberapa jaringan jalan yang belum terpetakan.
- Kecamatan Conggeang : 62% permukiman di Kecamatan Conggeang belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan karena hanya terdapat 1 (satu) fasilitas kesehatan.
- Kecamatan Jatigede : 62% permukiman di Kecamatan Jatigede belum terjangkau. Meskipun terdapat 3 fasilitas kesehatan, namun keberadaan fasilitas kesehatan tersebut belum merata.
- Kecamatan Tanjungsari : 58% permukiman di Kecamatan Tanjungsari belum terjangkau. Meskipun di Kecamatan Tanjungsari sudah terdapat 3 fasilitas kesehatan, namun keberadaan fasilitas kesehatan tersebut belum merata.
- Kecamatan Ujungjaya : 71% permukiman di Kecamatan Ujungjaya belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan karena hanya terdapat 1 (satu) fasilitas kesehatan, sehingga masih banyak permukiman di Kecamatan Ujungjaya yang berada di luar radius jangkauan layanan fasilitas kesehatan tersebut.

Adapun luas dan persentase wilayah permukiman di Kabupaten Sumedang dilihat berdasarkan masing-masing fasilitas kesehatan ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan wilayah permukiman yang terjangkau dari masing-masing fasilitas kesehatan, klinik merupakan fasilitas kesehatan dengan jangkauan paling luas yaitu mampu menjangkau 61% permukiman di Kabupaten Sumedang. Hal ini dikarenakan radius jangkauan klinik sebesar 4.000 meter dan ketersediaan klinik di Kabupaten Sumedang sebanyak 86 klinik. Adapun fasilitas kesehatan dengan jangkauan pelayanan paling kecil adalah puskesmas pembantu. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Sumedang sebanyak 39 fasilitas. Walaupun demikian, radius jangkauan puskesmas pembantu merupakan paling pendek yaitu 1.500 meter, sehingga mempengaruhi jangkauan pelayanan dari puskesmas pembantu terhadap permukiman di Kabupaten Sumedang.

Tabel 3 Luas dan Persentase Permukiman di Kabupaten Sumedang yang Terjangkau dan Belum Terjangkau Berdasarkan Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Luas Permukiman (Ha)		Persentase (%)	
		Terjangkau	Belum Terjangkau	Terjangkau	Belum Terjangkau
1	Rumah Sakit	1.887	10.426	15	85
2	Klinik	7.554	4.759	61	39
3	Puskesmas	6.244	6.069	51	49
4	Puskesmas Pembantu	1.581	10.732	13	87

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap permukiman diperoleh kesimpulan bahwa fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya dapat menjangkau wilayah permukiman di Kabupaten Sumedang sebesar 73% dari keseluruhan luas permukiman yang ada. Wilayah kecamatan dengan permukiman yang belum terjangkau merupakan kecamatan dengan jumlah dan keberadaan fasilitas kesehatan yang belum merata. Selain itu, topografi wilayahnya memiliki tingkat kemiringan yang bervariasi, sehingga menambah kompleksitas dalam distribusi dan keterjangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap permukiman. Berdasarkan jenis fasilitas kesehatannya, klinik merupakan fasilitas kesehatan yang mempunyai jangkauan layanan terhadap permukiman di Kabupaten Sumedang yang paling luas, yaitu mencapai 61%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D., & Zain, I. M. (2019). Studi Pola Keterjangkauan Puskesmas di Kabupaten Lamongan. *Swara Bhumi*, 1(2), 1-7. Diakses pada tanggal 22 Juni 2024 dari <https://www.academia.edu/download/103030727/230708391.pdf>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2023). *Kabupaten Sumedang dalam Angka 2023*. Sumedang.
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). *SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta.
- Budiman, R., & Cahyono, A. B. (2017). Analisis Spasial Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Pengunjung di Kota Blitar. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C353-C356. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024 dari <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/23658>.
- Dhewi, R., & Kuspriyanto, M. K. (2019). Studi Pola Persebaran Pusat Kesehatan Masyarakat Wilayah Kabupaten Tuban. Diakses pada tanggal 14 Juni 2024 dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/230708474.pdf>.
- Natsir, A. W. P., Setiawan, I., & Somantri, L. (2021). Analisis Penentuan Lokasi Rumah Sakit Tipe C Baru Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di Kabupaten Sumedang. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota dan Permukiman*, 55-71. Diakses pada tanggal 22 April 2024 dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/59139>.
- Niwa, M. S., & Saputra, A. (2024). *Analisis Pola Sebaran dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Masyarakat Terhadap Permukiman di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022*. Disertasi. Program Studi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal 14 Juni 2024 dari <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/119312>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rahmah, I. M., Anggraeni, F. N., & Andita, W. A. N. (2023). Analisis Pola Sebaran dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Terhadap Pemukiman Dengan Analisis *Buffering* dan *Near Neighbour Analysis* di Kecamatan Pulo Gadung. *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), 104-116. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024 dari <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsg/article/view/38153>.

Wiguno, H. (2021). Analisis Spasial Sebaran Tingkat Rawan Bencana Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis pada Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. *Prosiding FTSP Series*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024 dari: <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/484>.